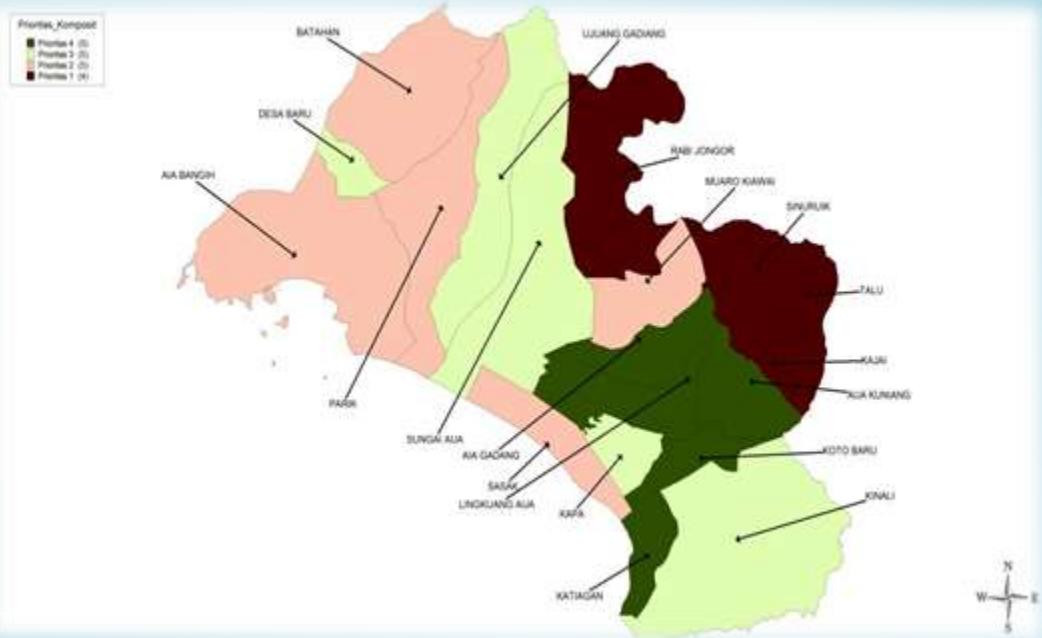




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP/LKj)

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2021**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2020. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 29 Tahun 2010 *tentang* Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 16 (Enam Belas) indikator dalam 5 (Lima) Sasaran sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2019 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2020 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 95,50% (Sangat baik).

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini, Segala keberhasilan Badan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Sukamenanti, Januari 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman barat



DAFTAR ISI

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Organisasi
 - C.1. Struktur Organisasi
 - C.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Instansi
 - C.1.2. Struktur Organisasi
 - C.1.2. Struktur Organisasi
 - C.2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - C.3 Sumber Daya Manusia
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II

Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV

Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Di Masa Mendatang

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Ketahanan pangan sangat penting bagi pembangunan suatu daerah khususnya Kabupaten Pasaman Barat, karena sebagai pemenuhan hak azasi bagi manusia di bidang pangan, salah satu pilar dalam ketahanan nasional, dan eksistensi kedaulatan bangsa, Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Kabupaten Pasaman Barat

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2020, perlu mempertimbangkan : (1) Keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsitusi kelembagaan dalam Mendorong peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) Sinergitas antar program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) Sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

Penyempurnaan Sistem Instansi Pemerintah (good governance) dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan khususnya Dinas Ketahanan Pangan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan dengan kemampuan sendiri oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) dan bersih (clean government). Seiring dengan perubahan paradigma tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang mengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, dituntut harus mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal.

Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu eselon II pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan pengukuran kinerja, maka Dinas Ketahanan Pangan harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi..

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli ditingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen, dan dengan penetapan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2018 bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pangan.

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan dengan memperhatikan visi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Berdasarkan pada hal tersebut diatas, visi Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang melaksanakan program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang cukup;
2. Mengembangkan sistem kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan;
3. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang aman, sehat dan bergizi.

Misi Kesatu : Penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang cukup:

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana alam yang tidak terduga (banjir, longsor, keringan), sehingga memerlukan pencadangan pangan yang baik dan tercukupi di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi dan jumlah penduduk. Ketercapaian program ini harus didukung oleh peraturan daerah dalam pengelolaan cadangan pangan.

Misi Kedua : Mengembangkan sistem kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan

Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu daerah mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan pangan akan terganggu. Proses pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian dapat dicapai dengan langkah : peningkatan kewaspadaan pangan di tingkat wilayah dengan meningkatkan pengetahuan secara dini dalam mengantisifasi kerawanan pangan, salah satunya diversifikasi pangan.

Misi Ketiga : Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang aman, sehat dan bergizi

Pembangunan ketahanan pangan berwawasan lingkungan adalah pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara penerapan teknologi tepat guna peningkatan

keanekaragaman konsumsi pangan ditujukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar mengkonsumsi bahan pangan yang beranekaragam, bergizi dan seimbang.

C. Gambaran tentang organisasi



C.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat memperlihatkan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Sub bagian yaitu:
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Seksi Ketersediaan Pangan;
 - Seksi Akses Pangan;
 - Seksi Kerawanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Seksi Distribusi Pangan;
 - Seksi Harga Pangan;
 - Seksi Cadangan Pangan.
 3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Penganekaragaman Pangan;
 - Seksi Keamanan Pangan.
 - 4). Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

- a. Analis Ketahanan Pangan;
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- d. Jabatan fungsional lainnya

C.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Landasan hukum pembentukan instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan.

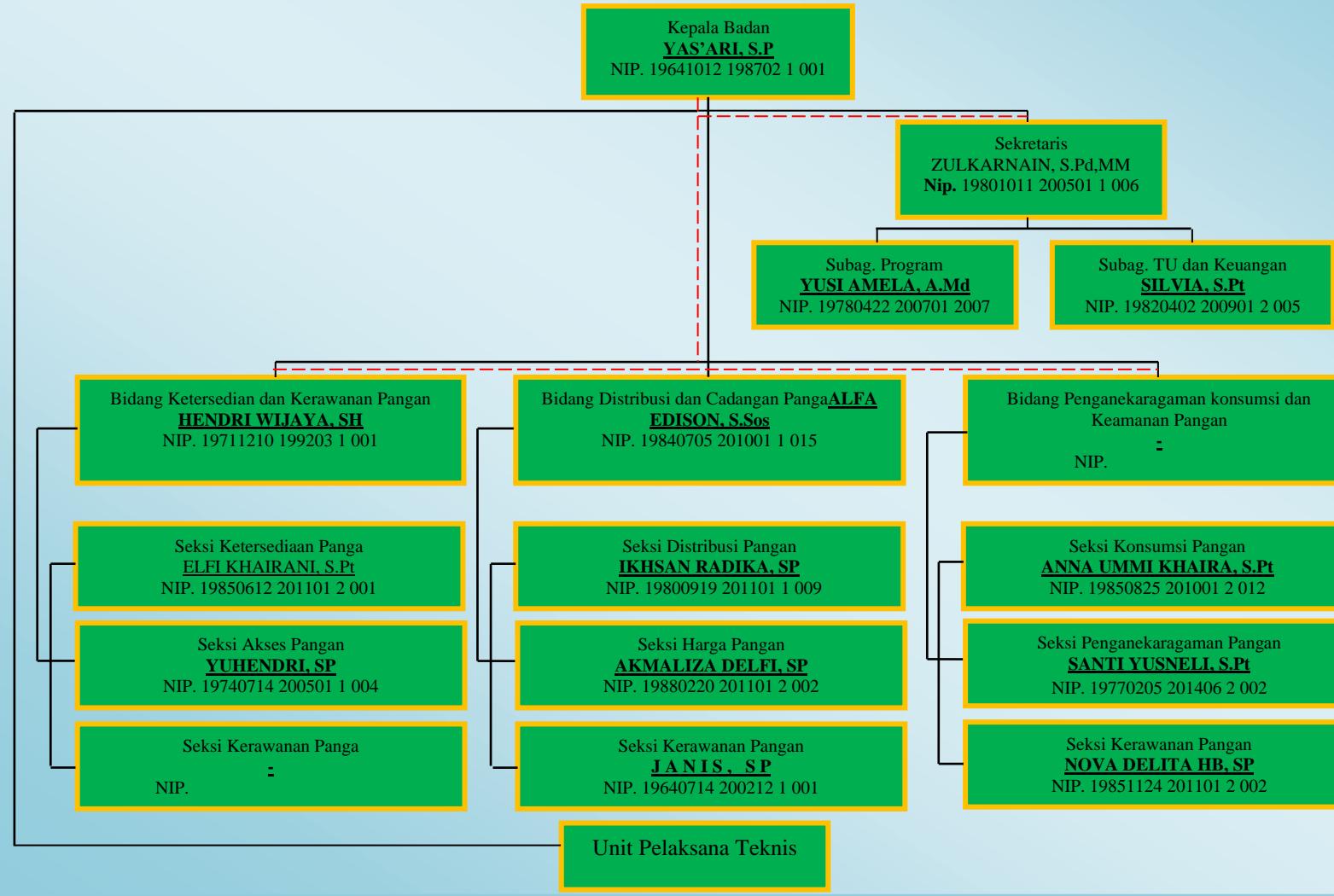
C.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Tanggal : 2019

Tentang : tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, organisasi Dinas Ketahanan Pangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



C.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sampai tanggal 31 Desember 2020.

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

Pendidikan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
S3	-	-
S2	2	2
S1	35	35
DIII	6	5
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	13	13
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	57	56

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
IV	4	4
III	13	12
II	-	-
I	-	-
Honor	2	2
Kontrak	38	38
Jumlah	57	56

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pangan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tersebut, diidentifikasi permasalahan ketahanan pangan yang saat ini dihadapi sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Pemantapan Ketersediaan Pangan berbasis kemandirian
2. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi bencana yang tidak terduga memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik
3. Rendahnya dalam kemampuan mengakses pangan
4. Belum maksimalnya dalam kelancaran distribusi dan akses pangan
5. Belum terjaminnya stabilitas harga pangan
6. Rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal
7. Rendahnya status gizi masyarakat
8. Rendahnya mutu dan keamanan pangan terutama pangan segar

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, latar belakang, maksud dan tujuan, serta gambaran, Aspek strategis Organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Menjelasan:

- a. Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun n
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunn dengan tahun n-1 serta beberapa tahun sebelumnya

- Membandingkan realisasi kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan
 - Membandingkan realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional (jika ada)
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian PK
- b. Realisasi Anggaran
- Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan langkah-langkah atau saran-saran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan dengan memperhatikan visi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Berdasarkan pada hal tersebut diatas, visi Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang melaksanakan program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang cukup
2. Mengembangkan sistem kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan
3. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang aman, sehat dan bergizi

Misi Kesatu : Penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang cukup:

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana alam yang tidak terduga (banjir, longsor, keringan), sehingga memerlukan pencadangan pangan yang baik dan tercukupi di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi dan jumlah penduduk. Ketercapaian program ini harus didukung oleh peraturan daerah dalam pengelolaan cadangan pangan.

Misi Kedua : Mengembangkan sistem kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan

Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu daerah mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan pangan akan terganggu. Proses pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian dapat dicapai dengan langkah : peningkatan kewaspadaan pangan di tingkat wilayah dengan meningkatkan pengetahuan secara dini dalam mengantisifasi kerawanan pangan, salah satunya diversifikasi pangan.

Misi Ketiga : Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang aman, sehat dan bergizi

Pembangunan ketahanan pangan berwawasan lingkungan adalah pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara penerapan teknologi tepat guna . peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan ditujukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar mengkonsumsi bahan pangan yang beranekaragam,bergizi dan seimbang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Misi 1 Penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang cukup					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	Program
1 Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal	1 Terpantau Daerah yang rawan bencana	1 Sosialisasi Pemanfaatan cadangan pangan daerah/Pemerintah	1	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan cadangan pangan Daerah/Pemerintah	1 Peningkatan Ketahanan Pangan

Misi 2 Mengembangkan sistem kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	Program
1 Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan	1 Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Peningkatan Sosialisasi dan pendataan daerah rawan pangan	1	Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan Pengembangan Desa/Nagari Mandiri Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal	1 Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan yang bermutu, aman dan bergizi	1 Pendataan dan Pengawasan konsumsi Pangan masyarakat	1	Melaksanakan Lomba Cipta Menu di tingkat Ibu-Ibu	Peningkatan Ketahanan Pangan
		2 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	2	Kampanye Ketahanan Pangan	
	2 Terpantau akses pangan strategis	3 Pelatihan Olahan Pangan Lokal			
		1 Peningkatan akses pangan masyarakat dan pemantauan harga pangan strategis	1	Pemantauan Harga Pangan strategis melalui petugas harga pangan Penyusunan Database Ketahanan Pangan	Program peningkatan Ketahanan Pangan

Misi 3**Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang aman, sehat dan bergizi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1 Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal	1 Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya Alam yang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan penerapan teknologi ramah lingkungan	1 Peningkatkan pengetahuan Petani/Masyarakat tentang penggunaan SDA yang didukung teknologi ramah lingkungan	1 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 2 Pelatihan olahan pangan lokal	1 Program peningkatan Ketahanan Pangan

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020



Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. Pada tabel berikut akan disajikan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpantauanya Daerah yang rawan bencana	Jumlah penanganan daerah rawan pangan/bencana di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan
		Terwujudnya rencana aksi desa/nagari mandiri pangan	2 SL
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan
		Pembinaan lumbung pangan masyarakat	11 Kecamatan
		Jumlah pemanfaatan bahan pangan lokal	24 Kelompok
		Pelatihan pengolahan pangan lokal kepada masyarakat	15 Kelompok
		Jumlah sample pangan yang aman	35 Sampel
3.	Terpantauanya akses pangan strategis	Tersedianya data perkembangan harga pangan strategis Kabupaten Pasaman Barat	12 Bulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Peningkatkan pengetahuan Petani/Masyarakat tentang penggunaan SDA yang didukung teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya kemampuan manajemen Gapoktan pelaksanaan	10 Kelompok
		Tersedianya rumusan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat	2 Dokumen
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kontak Tani Nelayan Andalan dan aparatur	37 Orang
5.	Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya Alam yang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan penerapan teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan	2 Kali
		Pemberdayaan masyarakat dalam gelar pangan nusantara	1 Kali
		Pemanfaatan SDA sekitar perkarangan rumah dengan berwawasan lingkungan	51 Kelompok



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis terhadap 5 (Lima) sasaran 16 (Enam Belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA



Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1. 1 Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

NO	SKALA PENILAIAN	KATEGORI KEBERHASILAN
1	85%-100%	Sangat Baik
2	75%-84%	Baik
3	56%-74%	Cukup
3	<55%	Kurang

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA



Hasil pengukuran pencapaian target 16 (Enam belas) indikator kinerja utama 5 (Lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2. 1. Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1	Penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang cukup				
Tujuan	Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal				
	1. Terpantauanya Daerah yang rawan bencana	1.1.Persediaan cadangan pangan pemerintah	50 Ton	50 Ton	100%
		1.2.Terwujudnya rencana aksi desa/nagari mandiri pangan	2 Kelompok	2 Kelompok	70%
Misi 2	Mengembangkan sistem kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan				
Tujuan	Menantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan				
	2.1.Meningkatkan kewaspadaan pangan di tingkat wilayah dengan meningkatkan pengetahuan secara dini dalam mengantisifasi kerawanan pangan	2.1.1. kajian aksi penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
		2.1.2. Meningkatnya peran dan kapasitas kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat	8 Kelompok	8 Kelompok	100%
		2.1.3. Adanya peta keawanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	1 Dokumen	0 Dokumen	70 %

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2.1.4. Peningkatan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
Tujuan	Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal				
	2.2. Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan yang bermutu, aman dan bergizi	2.2.1. Nilai neraca bahan makanan Kabupaten Pasaman Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2.2.2. Peningkatan bahan pangan lokal dan menurunkan gizi buruk pada masyarakat	1 kali	0 kali	65%
		2.2.3. Terwujudnya kelompok wanita tani dalam usaha ekonomi produktif	26 Kelompok	26 Kelompok	100%
		2.2.4. Terserap informasi program program ketahanan pangan oleh masyarakat	1 Kali	1 Kali	100%
		2.2.5. Jumlah sample pangan yang aman	20 Sampel	20 Sampel	100%
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan	Meningkatkan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan				

	2.3.Terpantauya akses pangan strategis	2.3.1. Tersedianya data perkembangan harga pangan strategis Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
		2.3.2. Meningkatnya peran dan fungsi toko tani indonesia	3 Gapoktan	3 Gapoktan	100%
		2.3.3. Meningkatnya SDM pengelola kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat	10 Gapoktan	10 Gapoktan	100%
		2.3.4. Tersedianya dokumen kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	2 Dokumen	0 Dokumen	70%
No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
MISI 3	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yang aman, sehat dan bergizi				
Tujuan	Memantapkan dan mengembangkan keterdianan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal				

	3.2. Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya Alam yang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan penerapan teknologi ramah lingkungan	3.2.1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan	1 Kali	1 Kali	100%
--	--	---	--------	--------	------

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, rata-rata capaian 16 (Enam belas) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian 5 (Lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah dengan capaian rata-rata 100%. Tingkat capaian terendah adalah sebesar 50% yaitu indikator kinerja Cadangan Pangan Pemerintah pada indikator kinerja persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot). Rekapitulasi capaian kinerja 16 (Enam belas) indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 tabel Capaian indikator Kinerja kategori keberhasilan

NO	Kategori Keberhasilan	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Baik	12 Indikator Kinerja
2	Baik	0 Indikator Kinerja
3	Cukup	4 Indikator Kinerja
4	Kurang	0 Indikator Kinerja
Jumlah		18 Indikator Kinerja

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

MISI 1 “PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN DAERAH YANG CUKUP”

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana alam yang tidak terduga (banjir, longsor, keringan), sehingga memerlukan pencadangan pangan yang baik dan tercukupi di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi dan jumlah penduduk. Ketercapaian program ini harus didukung oleh peraturan daerah dalam pengelolaan cadangan pangan.

Tujuan 1.1 Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal

Realisasi indikator kinerja pada tujuan 1 dapat disajikan pada tabel 3.3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3. 1. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.1

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Persediaan cadangan pangan pemerintah	50 Ton	76,3 Ton
2	Terwujudnya rencana aksi desa/nagari mandiri pangan	2 Kelompok	2 Kelompok

Dari tabel diatas dapat dilihat ada penambahan stok untuk tahun 2020. Adapun fungsi dari cadangan pangan pemerintah ini untuk mengantisipasi terjadi kerawanan pangan di daerah yang tertimpa bencana. Penyediaan cadangan pangan pemerintah yang harus tersedia dan ditempat di perum bulog harusnya tersedia 100 ton, dan adapun target untuk persedian tahun 2020 kalau di lihat dari renstra adalah 92 ton.

Dari uraian diatas pencapaian indikator pada misi 1 dan tujuan 1 cukup terlaksana dengan baik dan capaian pada indikator sasaran pada tahun 2020 untuk cadangan pangan pemerintah sudah hampir tercapai dengan baik.

Sasaran Strategi 1.1.1 Terpantau Daerah yang rawan bencana

Sepanjang Tahun 2020 beras Cadangan Pangan pemerintah tersebut disalurkan untuk : 1). Bantuan bencana alam (banjir) di Kecamatan Gunung Tuleh dan bantuan beras di keluarkan dari bulog sebanyak 814 (delapan ratus empat belas) Kg yang di bagikan kepada masyarakat; 2). 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) Kg untuk

bantuan darurat Covid-19 yang diserahkan langsung melalui Dinas sosial Kabupaten Pasaman Barat; 3). 55.191 (Lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu) Kg untuk bantuan tanggap darurat Covid-19.

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.

Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

1. Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.
2. Pemberian bantuan atau penyerahan bantuan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan atau instansi yang ditugaskan / yang diberi wewenang oleh Bupati adalah diserahterimakan kepada Camat/Sekretaris Camat dan atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut.
3. Pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah yang diserahkan dan telah diterima oleh Camat/Sekretaris Camat dan atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan atau Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) atau instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan/ mendistribusikan bantuan kepada masing-masing yang terkena musibah / yang terkena bencana rawan pangan dengan berita acara penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Walinagari/Kepala Jorong/Kepala Jorong atau pejabat yang berwenang mengetahui.
4. Berita acara penyerahan/tanda terima bantuan dimaksud huruf c oleh Camat disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak

menerima.

5. Pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana / rawan pangan diberikan apabila daerah tersebut mengalami bencana atau rawan pangan yang berdampak minimal 25 (dua puluh lima) kepala keluarga untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama antara 5 (lima) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari.
6. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan atau terjadi kenaikan harga yang tinggi dan lebih besar dari 25%, Pemerintah Kecamatan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah

SOP Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

1. Menerima Laporan terjadinya Bencana yang mengakibatkan keadaan rawan pangan dari aparat pemerintah di lokasi dan kecamatan terjadi bencana.
2. Melaksanakan survey ke tempat kejadian serta pengambilan data kejadian
3. Mengajukan laporan dan TS pada Bupati Pasaman Barat
4. TS Bupati tentang pengambilan cadangan pangan pemerintah ke Bulog
5. Pengambilan DO beras ke Bulog Divre Bukittinggi tempat Cadangan beras di titipkan.
6. Droping beras ke lokasi kejadian.
7. Pembagian beras oleh tenaga di lokasi bencana oleh sudah di tunjuk dengan penandatanganan bukti penerimaan beras bantuan oleh masyarakat yang menerima
8. Menyampaikan laporan bantuan yang diberikan kepada Bupati Pasaman Barat.

Dengan kegiatan dan indikator kinerja Pengembangan Desa Mandiri Pangan dapat memberikan dampak kekurangan pangan dan menambah mutu gizi pangan keluarga. Dari pelaksanaan diatas hanya diberikan stok bahan pokok untuk selama lima belas, dengan adanya program desa mandiri pangan di lokasi tersebut dapat memberi dampak warga sekitaranya dalam mencukupi persedian bahan pangan pokok keluarga dan gizi keluarga sehingga kebutuhan pokok pada daerah berdampak dapat mandiri dalam penyediaan pangan keluarga dan daerah sekitar pelakunya

Dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator sasaran strategis dapat dicapai

dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun anggaran 2020

MISI 2 “MENGEMBANGKAN SISTEM KERAWANAN PANGAN DAN INTERVENSI KRISIS PANGAN”

Dari misi ini kita menggunakan program kegiatan yang telah pernah ada namun masih ada yang fakum dan kurang efektif dari kelompok-kelompok penerima program kegiatan, ini akan dijadikan sarana program pembinaan ketahap kemandirian dan akan dijadikan kelompok tersebut sebagai pendeksi kerawanan pangan, sehingga menjadi bagian dari sistem kerawanan pangan pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat kedepannya

Tujuan 2.1. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

Kondisi dan situasi pangan dan gizi di daerah dapat ditunjukkan melalui hasil analisis SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi). Sesuai Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG, pada dasarnya adalah :

1. Analisis situasi pangan bulanan;
2. Analisis situasi pangan tahunan;
3. Diseminasi dan penyebarluasan informasi.

Hasil analisis SKPG menggambarkan situasi pangan dan gizi pada suatu wilayah melalui tiga aspek yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Hasil analisis SKPG dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan investigasi untuk melihat kedalaman rawan pangan dan intervensi penanganan rawan pangan di lokasi rawan pangan. Agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan sebagai acuan bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis dalam penanganan program kegiatan meningkatkan kewaspadaan di tingkat wilayah dan langkah selanjutnya sebagai rekomendasi dari Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat. Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi aparat di daerah dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan 2.1. dari misi 2 ini adalah antisipasi terhadap terjadi kerawanan pangan di suatu wilayah dan diikuti dengan penanganan kewaspadaan terhadap

kerawanan pangan dengan meningkatkan pengetahuan pelaku utama dan melakukan sosialisasi di wilayah yang akan berdampak kerawanan pangan dan dukungan program kegiatan yang mengacu kepada SKPG adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. 2. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.1.

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Kajian aksi penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan	11 Kecamatan
2	Meningkatnya peran dan kapasitas kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat	8 Kelompok	12 Kelompok
3	Adanya peta kerawanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	0 Dokumen	1 Dokumen
4	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan di kabupaten pasaman barat	1 Kali	2 Kali

Dari indikator kinerja tabel diatas mengambarkan target kegiatan dalam mengantisipasi kerawanan pangan dengan mengidentifikasi kerawanan pangan dengan peta kerawanan pangan, meningkatkan fungsi dari lumbung pangan dalam mengidentifikasi kerawanan melalui perhitungan dari isi lumbung dan tingkat gizi yang diperoleh dari stok pangan yang ada, pengguna dan penerima manfaat lumbung serta konsumsi pangan dan dari waktu panen.

Dengan meningkat intensitas penanganan daerah rawan pangan di suatu lokasi akan menghasilkan kajian tentang aksi penanganan suatu daerah yang berdampak pada kerawanan pangan, ini menjadi informasi yang bisa disosialisasikan dalam penanganan daerah lainnya yang akan berdampak pada kerawanan pangan.

Sasaran Strategi 2.1.1 Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan

Untuk mencapai sasaran strategi pada tujuan 2.1 dengan 4 (Empat) indikator kinerja, dalam mencapai target dari indikator kinerja tersebut sesuai dengan anggaran kegiatan yang ada dilaksanakan. Sesuai dengan wilayah administratif dari pejabat peserta

penangan daerah rawan pangan merupakan orang yang akan memberi informasi tentang identifikasi kerawanan pangan di wilayah kerjanya dan yang akan melaksanakan penanganan daerah rawan yang teridentifikasi akan berdampak kerawanan pangan.

Dalam hal memversifikasi berbagai bahan makanan perlu informasi dalam mengembangkan bahan makan tertentu sesuai kebutuhan gizi pekerjaannya serta pengolahan bahan makan menjadi makanan yang menggugah selera sehingga terpaku pada hanya pangan pokok tertentu saja yang lebih sesuai dengan kebutuhan energi pekerjaannya dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas bahan makanan, sehingga diversifikasi makanan tersebut menjadi bermutu sesuai pekerjaannya

Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020 untuk indikator kinerja dalam hal diversifikasi konsumsi, mutu dan kemanan pangan pada inidikator sasaran strategis skor pola pangan harapan seperti dibawah ini :

Tabel 3.3. 3. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.2.

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Termanfaatkannya bahan pangan lokal dan menurunkan gizi buruk pada masyarakat	5 Kelompok	8 Kelompok
3	Terwujudnya kelompok wanita tani dalam usaha ekonomi produktif	17 Kelompok	19 Kelompok
4	Terserap informasi program program ketahanan pangan oleh masyarakat	1 Kali	2 Kali

Untuk indikator kinerja pada sasaran strategis pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dalam meningkatkan mutu dan keamanan pangan terutama pangan segar dan jualan pada sekolah anak anak seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. 4. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.2.

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Jumlah sample pangan yang aman	20 Sampel	13 Sampel

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat capai indikator kinerja Meningkatkan Diversifikasi konsumsi pangan, mengenali mutu dan keamanan pangan yang beragam, bermutu, dan bergizi serta menurunnya tingkat keracunan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan dapat tercapai dengan baik.

Sasaran Strategi 2.2.1 Skor Pola Pangan Harapan

1. Akurasi Neraca Bahan Makanan yang dihasilkan tergantung pada keandalan data yang tersedia baik itu data penyediaan, pemanfaatan dan jumlah penduduk.
2. Keterkaitan NBM dengan PPH yaitu; Angka Kecukupan Gizi dimana kecukupan rata – rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajad kesehatan optimal.
3. Pengelompokan pangan PPH : kalau NBM terdapat 11 Kelompok Pangan (Padi-padian, Makanan Merpati, Gula, Buah/Biji berminyak/kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kelapa, Buah-buahan, Sayur-sayuran, daging termasuk jeroan, telur, susu, ikan, minyak dan lemak. Kalau PPH terdapat 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, gula, buah biji berminyak/hanya kelapa, kacang-kacangan (kc tanah, kc hijau, kc merah), Sayur dan buah (minus kentang dan kc. Merah), pangan hewani (minus jeroan), minyak dan lemak (plus jeroan) dan lain-lain.

Sasaran Strategi 2.2.2 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

- ❖ Pemahaman terhadap pentingnya kesadaran keamanan pangan, baik selaku produsen, pedagang, maupun konsumen
- ❖ Mendorong dan memotivasi untuk penerapan hidup sehat mengkonsumsi pangan yang aman dimulai dari keluarga kita serta selektif dalam

memilih makanan yang aman.

Tabel 3.3.5. Daftar Kelompok Penerima Sertifikasi Prima

No	Nama	Alamat	Komoditi
1.	Usnil Amri	Jr. Giri Maju, Nagari Koto Alpukat	
2.	Wibowo	Baru, Kecamatan Luhak Nan	
3.	Khairul Basri	Duo, Kabupaten Pasaman	
4.	Aktiar	Barat	
5.	Asben		
6.	Nasrul Hayani		
7.	M. Yamin		
8.	M. Sri Milwani		

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah sasaran strategis 2 dari tujuan 2 pada misi 2, dilihat adari uraian diatas dari capaian pelaksanaan indikator kinerja tercapai dengan baik dalam mengawasi dan pembinaan keamanan pangan dengan adanya pemberian sertifikasi prima atas produksi Alpukat.

Tujuan 2.3. Meningkatkan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan khusus daerah Kabupaten Pasaman Barat salah satu dengan tujuan 2.3. adalah akses pangan merupakan yang aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan karena merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan serta merupakan Sistem Ketahanan Pangan mencakup pada Kebijakan Ekonomi dan Pangan serta Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi, adapun capaian tujuan 2.3. pada indikator kinerja sasaran strategis Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan, harga dan akses pangan seperti tabel dibawah :

Tabel 3.3.6. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.3.

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Adanya data perkembangan harga pangan strategis Kabupaten Pasaman Barat	11 Kecamatan	11 Kecamatan

Adapun untuk mengantisipasi gejolak harga pangan yang biasanya di akibat kekurangan pasokan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada sasaran strategis Stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tujuan 2.3 merupakan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kekurang pasokan bahan pangan di Kabupaten Pasaman Barat maka capaian indikator kinerja dapat di realisasikan seperti tabel dibawah ini yang di ukur dari anggaran kegiatan kegiatan pada sasaran strategis ini:

Tabel 3.3.7. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.3.

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Meningkatkan peran dan fungsi toko tani indonesia	3 Gapoktan	3 Gapoktan
2	Meningkatkan SDM pengelola kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat	10 Gapoktan	10 Gapoktan
NO	Indikator Kinerja	2020	2019
3	Tersusunnya dokumen kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Pasaman Barat	0 Dokumen	1 Dokumen
4	Meningkatkan SDM KTNA dan aparatur	0 kali	0 kali

Dalam rangka pembinaan kelompok kelompok dan gapoktan gapoktan

yang telah menjalani pemasok pangan untuk diberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengendalian harga pangan pokok di Kabupaten Pasaman Barat sehingga adanya kelompok dan gapoktan ini dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan di indikator kinerja pada sasaran strategis ini.

Sasaran Strategi 2.3.1 Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan, harga dan akses pangan

Dengan kurang informasi, akses, dan harga pangan di Kabupaten Pasaman Barat dari itu indikator kinerja ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai tujuan 2.3 dari misi 2 ini dilaksanakan sosiali kegiatan akses pangan.

- Sistem Ketahanan Pangan mencakup pada Kebijakan Ekonomi dan Pangan serta Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi
- Akses Pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan karena merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan.

Capaian indikator kinerja ini pada kegiatan ini tercapai dengan baik dilihat dari peserta pertemuan yang akan mengembangkan informasi akses pangan di wilayah administratif yang di pimpinnya serta instansi yang akan mendukung program kegiatan ini adapun dalam pelaksanakan kegiatan di bidang pangan diperlukan data yang sangat valid sehingga dilaksanakan pertemuan penyusunan data base yang mendukung program kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran Strategi 2.3.2 Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan, harga dan akses pangan

Pelaksanaan pada indikator kinerja pada sasaran strategis 2 pada tujuan 3 pada misi 2 ini dengan 4 kegiatan : Pendampingan toko tani indonesia, Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Dewan Ketahanan Pangan dan Pekan Nasional (Tani). Uraian untuk kegiatan Pendampingan toko tani indonesia seperti dibawah ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan toko tani dilaksanakan dengan membantu mereka dalam merapikan administrasi penjualan dan pembelian gabah untuk tahun 2020 kita memfokuskan pada pangan pokok yaitu beras, pendampingan ini dilaksanakan di 3 (tiga) gapoktan atau TTI yang di Kabupaten Pasaman Barat.

Dari uraian diatas pada sasaran strategis misi 2 pada tujuan 3 dan sasaran strategis 2 dapat dilaksanakan dengan baik begitu juga capaian nya baik kegiatan penunjang dan kegiatan yang utama dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun anggaran 2020.

MISI 3 “PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL YANG AMAN, SEHAT DAN BERGIZI”

Dari misi ini pada tahun anggaran 2020 tidak dapat dilaksanakan pengenalan terhadap keberagaman konsumsi sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada pergelaran pergelaran tertentu contohnya Hari Pangan Sedunia dengan mengikuti pergelaran tersebut untuk mendapat masukan dan pengetahuan tetang pengolahan bahan pangan yang mudah di dapat di daerah Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan permasalahan wbah Covid-19.

Tujuan 3.1. Mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara penerapan teknologi ramah lingkungan.

Untuk anggaran tahun 2020 misi 3 yang punya satu tujuan yaitu mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara penerapan teknologi ramah lingkungan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat baru tidak menganggarkan untuk satu indikator kinerja pada kegiatan olahan pangan lokal dengan target capaian seperti tabel 3.3.8 dibawah ini

Tabel 3.3.8. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.3.

NO	Indikator Kinerja	2020	2019
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan	0 Kali	1 Kali

Dari indikator kinerja tabel diatas dapat dilihat tidak terlaksananya capaian target karena pengurangan dana untuk penanganan Covid-19.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran *belanja langsung* sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.880.531.962,-. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan Rp. 1.072.083.350,- dan sisanya program kegiatan rutin dari pelayan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebagaimana tercantum pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1. Realisasi Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Cadangan Pangan Pemerintah	636.388.600,-	606.549.850,-	96,31
2	Penanganan daerah rawan pangan	79.001.500,-	78.816.550,-	99,76
3	Skor Pola Pangan Harapan	92.166.800,-	90.605.550,-	98,30
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	59.163.450,-	57.802.150,-	97,69
5	Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan, harga dan akses pangan	75.291.400,-	71.211.400,-	94,58
6	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	82.273.600,-	77.650.750,-	94,38
7	Percentase ketersediaan energi protein perkapita	47.798.000,-	47.550.150,-	99,48
JUMLAH		1.072.083.530,-	1.030.186.400,-	96,09

Dari realisasi anggaran pada tahun 2020 sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tercapai sangat baik dalam penyerapan anggaran belanja seperti di tabel diatas dengan realisasi tertinggi pada sasaran strategis Penaganan daerah rawan Pangan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Penyusunan Peta Kerawanan. Realisasi terendah pada Sasaran strategis terhadap Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan yang terdiri 1(satu) indikator kinerja yaitu Panel Harga dan Pematauan Harga Pasar.

BAB IV

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber dana lainnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020;
- b. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian target 5 (lima) Sasaran strategis dengan 16 (Enam belas) Indikator Kinerja Utama.
- c. Rata-rata capaian 16 (Enam belas) Indikator Kinerja Utama sebesar 100%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 termasuk kategori keberhasilan sangat baik.
- d. Kategori penilaian keberhasilan 16 (Enam belas) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
- e. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori Sangat Baik (85% - 100% atau > 100%) sebanyak 12 indikator kinerja utama dan 4 indikator kinerja dengan kategori Cukup.
- f. Anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian 5 (lima) sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.030.186.400,- dengan realisasi 96,09% dari total anggaran yang disediakan Tahun 2020.

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat salah satunya didorong oleh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP merupakan sistem yang dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen kepala bidang selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sampai ke kepala seksi serta seluruh staf bidangnya untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas yang langsung dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dan dokumen akuntabilitas kinerja SKPD yang dimulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2016-2021 dengan mengimplementasikan pola pikir yang berorientasi hasil.
3. Menyelaraskan penerapan Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkesimbungan.
4. Meningkatkan pengelolaan data kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.